

Analisis Penerapan PSAK 57 terkait Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan pada PT Aneka Tambang Tbk

AMELIA PUSPITA RENGGANIS¹; BALQIS KAZAMA KINARI²; LIA UZLIAWATI³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka No.Km 3, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

E-mail : 5552200114@untirta.ac.id (korespondensi)

Submit : 2023-04-08

Review : 2023-04-15

Publish : 2023-05-26

Abstract: The development of businesses in mining sector in the current era, has a large negative impact on the surrounding environment. This study aims to understand the concept of applying PSAK 57 regarding the recognition and measurement of provisions related to corporate environmental responsibility in PT Aneka Tambang Tbk. Using a descriptive qualitative approach, the results show that PT Aneka Tambang Tbk has recognized, measured, and disclosed provisions related to its social and environmental responsibility in accordance with PSAK 57.

Keywords: *Provision, PSAK 57, CSR*

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau yang biasa disingkat PSAK telah digunakan perusahaan di Indonesia sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Pernyataan yang disusun oleh IAI ini berisi aturan mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan perusahaan. Fungsi utama PSAK adalah membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami laporan keuangan (Endaryati, 2022). Dengan menggunakan sebuah standar sebagai pedoman, laporan keuangan akan lebih mudah untuk dibandingkan dengan yang sebelumnya karena standar penulisan dan pencatatannya yang sama (Tommy, 2022).

PSAK 57 merupakan salah satu bagian pernyataan dimana mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan provisi, liabilitas kontijensi, dan aset kontijensi. Pernyataan ini sering dikaitkan dengan kebijakan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan karena dalam hal tersebut berkaitan dengan biaya-biaya yang belum pasti muncul sebagai kewajiban perusahaan di masa kini akibat peristiwa di masa yang lalu.

Perkembangan bisnis khususnya pada bidang pertambangan pada era saat ini memberikan sebuah dampak negatif yang sangat besar terhadap lingkungan sekitar

(Marsela, Mediaty, & Said, 2021). Hal tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang kewajiban perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar dalam meminimalisasi dampak buruk yang ditimbulkan dari bisnis yang dijalkannya.

Akuntansi lingkungan didefinisikan sebagai pencegahan, pengurangan dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari beberapa kesempatan, dimulai dari perbaikan kembali kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut (Ikhsan, 2008). Akuntansi lingkungan adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (environmental cost) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah (Djogo, 2002).

Penelitian ini akan membahas bagaimana pengakuan dan pengungkapan biaya yang dikeluarkan terkait tanggung jawab lingkungan sesuai dengan PSAK 57 terkait provisi pada PT Aneka Tambang Tbk. Penelitian ini berkontribusi pada literasi tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan khususnya PSAK 57. Pemahaman tentang PSAK 57 ini menjadi penting mengingat saat ini pemerintah telah menetapkan undang-undang terkait dengan

tanggung jawab lingkungan perusahaan yang mana menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak dari aktivitas operasionalnya serta mengakui dan atau mengungkapkannya dalam laporan perusahaan sebagai bentuk komunikasi kepada para stakeholdernya.

PSAK 57

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 57 merupakan standar yang mengatur pengakuan provisi, liabilitas kontijensi, dan aset kontijensi. Menurut PSAK ini perusahaan yang melaksanakan pemulihan lingkungan karena limbah dapat mencatat biaya pemulihan tersebut sebagai provisi. Provisi tersebut diukur dengan estimasi terbaik biaya pemulihan. Provisi diakui sebagai kewajiban atas peristiwa yang terjadi di masa lalu, misal pencemaran lingkungan terjadi pada tahun 2021, maka provisi diakui sebagai provisi untuk pemulihan lingkungan atas pencemaran yang terjadi pada tahun 2021. Provisi dibedakan dari kewajiban lain karena dalam provisi terdapat ketidakpastian mengenai waktu dan jumlah yang dikeluarkan di masa depan untuk menyelesaikan provisi tersebut (IAI, 2016)

Teori Stakeholder

Teori Stakeholder pertama kali dikemukakan oleh Freeman pada tahun 1984. Teori stakeholder merupakan sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif (Marsela, Mediaty, & Said, 2021). Premis dasar dari teori stakeholder adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi (Totok, 2014).

Pendapat lain tentang stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (Handoko, 2014). Sehingga keberadaan suatu

perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi (Gray, Kouhy, & Lavers, 1995).

Teori Legitimasi

Teori Legitimasi dikembangkan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975 (Guthrie & Ward, 2006). Teori Legitimasi adalah sistem pengelolaan perusahaan yang berpihak terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat (Gray, Owen, & Adams, 1996). Hal ini mengindikasikan keharusan adanya pengungkapan sosial lingkungan dan adanya kontrak sosial antara perusahaan terhadap masyarakat. Apabila perusahaan tidak dapat mengimplementasikannya dengan benar, maka sistem ini akan menjadi ancaman (Fernando & Lawrence, 2014). Hal ini karena adanya nilai yang bermacam-macam yang menyebabkan kemungkinan conflict of interest semakin tinggi dimana dapat menyebabkan kesulitan dalam pencapaian objektif perusahaan. Namun apabila system ini dapat diimplementasikan dengan benar maka dapat mengurangi gap yang ada antara perusahaan dan masyarakat (Fernando & Lawrence, 2014)

Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan dianalogikan sebagai suatu kerangka kerja pengukuran kuantitatif terhadap kegiatan konservasi lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan (Utama, Suryawana, & Putra, 2014). Dalam istilah manajemen (Solihin, 2009) pengertian akuntansi lingkungan adalah proses accounting yang mengenali, mencari dan kemudian mengurangi efek-efek lingkungan negatif dari pelaksanaan praktek laporan yang konvensional, mengenali secara terpisah biaya-biaya dan penghasilan yang berhubungan dengan lingkungan dalam sistem laporan yang konvensional,

mengambil langkah aktif untuk menyusun inisiatif-inisiatif untuk memperbaiki efek-efek lingkungan yang timbul dari praktek-praktek pelaporan konvensional. Dalam hal perusahaan, setiap perusahaan pasti menghasilkan limbah dalam melakukan kegiatan operasinya. Oleh karena itu, menurut akuntansi lingkungan setiap perusahaan harus mengalokasikan dana untuk mengelola limbah agar mengurangi dampak yang ditimbulkan dari limbah tersebut.

Tujuan Akuntansi Lingkungan menurut Ikhsan (2008), ada beberapa tujuan dan maksud dikembangkannya akuntansi lingkungan yaitu sebagai berikut.

1. Sebagai alat manajemen lingkungan. Akuntansi lingkungan digunakan perusahaan dalam menilai keefektifan kegiatan konservasi lingkungan. Selain itu data tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan biaya pengelolaan lingkungan, biaya konservasi lingkungan, serta investasi yang diperlukan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan.
2. Sebagai alat komunikasi dengan masyarakat. Sebagai alat komunikasi kepada public, akuntansi lingkungan digunakan untuk menginformasikan dampak negative lingkungan, kegiatan konservasi yang dilakukan perusahaan, dan hasilnya kepada publik. Tanggapan yang diberikan masyarakat terkait hal tersebut akan digunakan sebagai umpan balik untuk perusahaan dalam mempertimbangkan pendekatan yang digunakan untuk pelestarian lingkungan.

METODE

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder laporan keuangan PT. Aneka Tambang Tbk yang didapat dari website idx.co.id. Perusahaan ini dijadikan objek penelitian untuk melihat bagaimana provisi perusahaan terkait dengan tanggung jawab lingkungan perusahaan

diakui, diukur, dan diungkapkan pada laporan keuangan.

HASIL

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 57

PSAK 57 bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas.

Pengakuan Provisi

Ada beberapa syarat yang menyebabkan provisi dapat diakui, yaitu apabila.

1. Entitas memiliki kewajiban kini sebagai akibat peristiwa masa lalu,
2. Penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya mengandung manfaat ekonomi,
3. Estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Namun dalam beberapa situasi perusahaan tidak dapat menentukan dengan pasti apakah kewajiban kini tersebut akan telah muncul di akhir periode pelaporan atau tidak. Maka dengan mempertimbangkan berbagai bukti, perusahaan harus memutuskan.

1. Mengakui provisi, yaitu jika kemungkinan besar kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan dan kriteria pengakuan provisi terpenuhi, atau
2. Mengungkapkan liabilitas kontinjensi, jika kemungkinan besar kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan

Peristiwa masa lalu, peristiwa masa lalu dapat menimbulkan kewajiban kini yang disebut peristiwa mengikat. Dalam hal tersebut entitas tidak mempunyai alternative lain realistis selain menyelesaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa tersebut. Kewajiban tersebut dapat

berbentuk kewajiban hukum maupun kewajiban konstruktif.

Kewajiban hukum timbul dari:

1. Suatu kontrak (secara eksplisit atau implisit);
2. Peraturan perundangundangan; atau
3. Pelaksanaan produk hukum lainnya.

Kewajiban konstruktif :

1. Berdasarkan praktik baku masa lalu, dan
2. Menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas pada masa datang. Contohnya pengakuan biaya kegiatan purna-operasi (decommissioning) instalasi minyak atau instalasi nuklir sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Apabila entitas bermaksud mengeluarkan biaya tertentu sehingga dapat menghindari kemungkinan pengeluaran biaya dan beroperasi dengan cara yang berbeda di masa depan (contohnya pemasangan instalasi pipa agar mengurangi kemungkinan munculnya biaya pascaoperasi) maka provisi tidak diakui.

Pengukuran Provisi

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban ini pada akhir periode pelaporan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan laporan tahunan PT Aneka Tambang Tbk, dapat dilihat bahwa PT Aneka Tambang Tbk melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan menerapkan ketentuan PSAK No. 57 khususnya dalam pengakuan provisi. Hal ini terlihat pada laporan posisi keuangan dimana PT Aneka Tambang Tbk mengakui provisi sebesar Rp 781.919.000.000 terkait dengan reklamasi pascatambang..

PT ANEKA TAMBANG TBK DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES		Lampiran 1/2 Schedule	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2021 AND 2020 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)	
	Catatan/ Notes	2021	2020
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	15	1,399,446	672,748
Beban akrual	16	723,302	624,041
Liabilitas imbalan karyawan jangka pendek		111,517	154,875
Utang muka pelanggan		1,123,315	651,172
Liabilitas derivatif		-	10,253
Utang pajak	17b	194,817	308,886
- Pajak penghasilan badan		142,626	147,039
- Pajak lain-lain		52,191	72,847
Liabilitas sewa, bagian jangka pendek	21	1,088,646	1,071,876
Pinjaman bank jangka pendek	18	-	2,095,241
Utang obligasi	19	-	-
Pinjaman investasi, bagian jangka pendek	20	1,079,630	1,033,259
Provisi reklamasi dan pascatambang, bagian jangka pendek	22	40,150	50,909
Utang lain-lain	20	630,149	626,145
Jumlah liabilitas jangka pendek		6,562,283	7,653,261
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian jangka pendek	21	83,710	87,796
Pinjaman investasi, setelah dikurangi bagian jangka pendek	20	3,703,354	3,387,857
Provisi reklamasi dan pascatambang, setelah dikurangi bagian jangka pendek	22	781,919	721,588
Provisi imbalan pascakerja	32	904,435	917,137
Liabilitas jangka panjang lainnya		43,255	22,625
Jumlah liabilitas jangka panjang		5,516,673	5,136,803
JUMLAH LIABILITAS		12,078,956	12,690,064

Sumber: Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Aneka Tambang Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021 AND 2020 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)	
2. KEBLIKLIAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)		2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)	
o. Provisi		o. Provision	
Provisi diakui apabila Grup mempunyai kewajiban (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.		Provisions are recognised when the Group has a present obligation (either legal or constructive) as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and the obligation can be reliably estimated. Provision is not recognised for future operating losses.	
Ketika terdapat beberapa kewajiban yang serupa, kemungkinan penyelesaian mengakibatkan arus kas keluar ditentukan dengan mempertimbangkan kelas kewajiban secara keseluruhan. Provisi diakui walaupun kemungkinan adanya arus keluar berhubungan dengan item manapun yang termasuk dalam kelas kewajiban yang sama mungkin kecil.		Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised even if the likelihood of an outflow with respect to one item included in the same class of obligations may be small.	
Grup memiliki kewajiban tertentu untuk menstabilkan dan merehabilitasi daerah pertambangan serta penarikan aset sesudah produksi selesai. Provisi reklamasi dan pascatambang tersebut diukur sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Perubahan takiran biaya reklamasi dan pascatambang yang akan terjadi dihitung secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang.		The Group has certain obligations for the restoration and rehabilitation of mining areas and the retirement of assets following the completion of production. Provision for reclamation and mine closure is measured at the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation using the pre-tax discount rate that reflects the current market assessment of the time value of money and the risks specific to the obligation. Changes in the estimated reclamation and mine closure expenditures to be incurred are accounted for on a prospective basis over the remaining mine life.	
Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menyesuaikan jumlah provisi reklamasi dan pascatambang untuk mencerminkan luas area terganggu terbaru.		At each reporting date, the Group updates the provision for reclamation and mine closure to reflect the most recent disturbed area.	

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan PT Aneka Tambang Tbk

Dalam catatan atas laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk juga dijelaskan mengenai pengakuan provisi dimana telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 57, yaitu diakui ketika perusahaan memiliki kewajiban ini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, dimana besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal.

Terkait provisi, PT Aneka Tambang Tbk juga mengakui provisi imbalan pascakerja sebesar Rp 904.435.000.000 dimana dijelaskan bahwa provisi ini berupa

liabilitas imbalan karyawan jangka panjang yang terdiri dari imbalan pensiun, imbalan kesehatan pascakerja, imbalan pascakerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Selain itu dijelaskan pula bahwa kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris.

Selain itu dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan PT Aneka Tambang Tbk juga menyebutkan kontribusinya pada pemeliharaan kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan penanaman pohon, selain yang dilakukan sebagai bagian dari aktivitas reklamasi lahan dan manajemen pascatambang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan bahwa PT Aneka Tambang Tbk telah menerapkan PSAK 57 dalam mengakui provisi terkait dengan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Provisi ini timbul karena adanya kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan setelah aktivitas operasi. Atas dasar simpulan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran agar PT Aneka Tambang Tbk terus berkomitmen dalam melakukan tanggung jawab lingkungan perusahaan dan terus konsisten dalam melaporkannya dalam laporan tahunan sesuai dengan PSAK 57.

DAFTAR RUJUKAN

Djogo, T. (2002). *Akuntansi Lingkungan*.

Endaryati, E. (2022, April 5). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Retrieved from Universitas STEKOM: <http://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Pern>

yataan-Standar-Akuntansi-
Keuangan-
PSAK/7a177bc32b048d833b4757
60b05d5c3bb9aa3f69

Fernando, S., & Lawrence, S. (2014). A theoretical framework for CSR practices: integrating legitimacy theory, stakeholder theory and institutional theory. *Journal of Theoretical Accounting Research*, 149-178.

Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate Social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. *Accounting Auditing & Accountability Journal*, 47-77.

Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate and Social Reporting*.

Guthrie, J., & Ward, L. (2006). Legitimacy theory: A story of reporting social and environmental matters within the Australian food and beverages industry.

Handoko, Y. (2014). Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif. *Jurnal JIBEKA*, 74.

IAI. (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*.

Ikhsan, A. (2008). *Akuntansi lingkungan didefinisikan sebagai pencegahan, pengurangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marsela, I., Mediaty, & Said, D. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB LINGKUNGAN PERUSAHAAN BERBASIS PSAK No. 57 (Studi Kasus: PT. Holcim Indonesia Tbk.,

PT. Aneka Tambang Tbk., dan PT. Atlas Resources Tbk) . *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Informatika*, 186-208.

Solihin, I. (2009). *Corporates Social responsibility, from charity to sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.

Tommy. (2022). *Pajakku*. Diambil kembali dari Apa Itu PSAK Dan Apa Kaitannya dengan Pajak?: <https://www.pajakku.com/read/62020e201c72eb1eee0cc0ca/Apa-Itu-PSAK-Dan-Apa-Kaitannya-dengan-Pajak?>

Totok, M. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial)*. Bandung: Alfabeta.

Utama, I. M., Suryawana, I. K., & Putra, I. W. (2014). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Akuntansi Lingkungan*. Denpasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.